

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi topik utama dalam bidang Ilmu Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan jangka panjang yang menjadi tolak ukur dalam mengukur kemajuan perekonomian dalam suatu wilayah, mulai dari Kota, Kabupaten, Provinsi hingga suatu Negara. Setiap negara berupaya memajukan perekonomiannya dengan berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan diantaranya adalah *Capital* (Modal), *Labour* (Tenaga kerja), Teknologi dan Sistem Sosial.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dimana terdapat peningkatan kemampuan dari perekonomian suatu negara dalam memproduksi output yaitu barang dan jasa yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara atau suatu daerah dalam periode waktu tertentu sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat (Mutiara, 2015).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah biasanya ditunjukkan dengan meningkatkan produksi barang dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau sektor-sektor ekonomi dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu.

Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah itu sama dengan pertumbuhan PDRB di wilayah tersebut (BPS, 2011).

Pertumbuhan ekonomi secara sederhana diartikan sebagai perubahan dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional dan perubahan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah dari tahun ke tahun. Jika tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu mengalami kenaikan lebih tinggi dari apa yang dicapai pada waktu sebelumnya maka suatu ekonomi dapat dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang.

Menurut Hasan (dalam Juwari dkk, 2016) Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dapat diwujudkan dengan cara meningkatkan penerimaan yang sumber dananya berasal dari dalam negeri, salah satunya adalah penerimaan pajak.

Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, jika taraf hidup masyarakat akan meningkat maka diperlukan anggaran yang selalu meningkat pula. Hal ini dapat dilihat dari anggaran pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun, berdasarkan data yang didapatkan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus mengalami peningkatan.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur APBN. Hampir 70% penerimaan berasal dari pajak. Berdasarkan data tiga tahun terakhir ini, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2013 sebesar Rp 1.072,1 triliun atau mencapai 93,4%, namun capaian tersebut masih berada dibawah target APBN-P 2013 yang sebesar Rp 1.148,4 triliun. Pada tahun 2014 target penerimaan pajak meleset dan realisasi pajak di tahun 2014 merupakan yang terendah di 25 tahun terakhir ini karena realisasinya hanya mencapai Rp 1.143 triliun atau sekitar 91,75%. Dan pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak mencapai 81,5% dari targetnya, pemerintah mampu merealisasikan penerimaan pajak senilai Rp 1.055 triliun pada 2015 kemarin. Jumlah tersebut mencapai 81,5% dari yang ditargetkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang tercatat Rp 1.294,25 triliun (Kementerian Keuangan RI, 2015).

Dalam penelitian (Helhel Y dan Demir Y, 2012) menjelaskan bahwa hubungan antara pajak dan pertumbuhan ekonomi sangat erat dan mempunyai hubungan jangka panjang, penelitian ini membuktikan besarnya peran pajak dalam pertumbuhan ekonomi di suatu Negara. Pajak merupakan suatu pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah untuk berbagai tujuan, misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengatur perekonomian, dan dapat juga untuk mengatur konsumsi masyarakat. Karena sifatnya yang dipaksakan tersebut maka pajak akan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat atau seseorang dan secara keseluruhan dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mengkaji hubungan pajak daerah dengan PDRB disini kita akan melihat adanya hubungan yang fungsional yaitu PDRB merupakan fungsi dari Pajak Daerah. Dengan menambah penerimaan pemerintah untuk pembangunan program-program pembangunan, selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.

Menurut pendapat Darise (dalam Mutiara, 2015) selain pajak daerah, retribusi daerah juga memiliki komponen penting dalam pendapatan asli daerah (PAD), yang diharapkan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Retribusi daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bukan pajak, retribusi daerah adalah pungutan daerah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Apabila penerimaan retribusi meningkat maka akan meningkatkan output berupa barang dan jasa yang dihasilkan (PDRB) karena retribusi daerah ini digunakan sebagai modal untuk menghasilkan besaran output berupa barang maupun jasa. Sedangkan penerimaan PAD yang lain adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, keduanya memiliki kontribusi yang sama pentingnya dengan retribusi daerah dalam penerimaan pendapatan asli daerah yang bukan pajak.

Fenomena pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami fluktuasi bahkan mengalami perlambatan pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,5 persen melambat dibanding tahun 2013 sebesar 5,9 persen. Perlambatan ekonomi Indonesia terjadi akibat dinamika ekonomi global yang tidak sesuai dengan perkiraan dan kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah, seperti target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Bank Indonesia yang masih sulit dicapai, bahkan Bank Indonesia melakukan revisi target pertumbuhan ekonomi karena mengalami banyak faktor yang mempengaruhi baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Bank Indonesia, 2014). Begitupun halnya yang terjadi pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi masih mengalami fluktuasi dan masih berkisar pada angka 5,5% di tahun 2014 yang turun dari tahun lalu yaitu 6,0 % (BPS, 2014). Meskipun pertumbuhan ekonomi provinsi lebih tinggi dibandingkan nasional, tetapi tetap saja penurunan yang terjadi merupakan imbas perekonomian nasional terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Barat yang menyebabkan kemerosotan pertumbuhan ekonomi di seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat secara keseluruhan.

Pemerintah telah memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri. Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting. Untuk melaksanakan pemerintahan yang berkesinambungan maka Daerah Kabupaten/Kota lebih di tuntut untuk dapat menggali se-optimal mungkin sumber-sumber keuangannya. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dimana komponen

utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen Pajak Daerah dan Bukan Pajak yaitu Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Penerimaan Pajak Daerah dan Bukan Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD di Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Yanpar, A (dalam Helhel Y dan Demir Y, 2012) pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu variabel makro yang berkaitan dengan penerimaan pajak. Model pertumbuhan neo-klasik menyatakan bahwa kebijakan ekonomi tidak memiliki dampak apapun untuk persentase pertumbuhan jangka panjang dan menghindari interferensi pemerintah melalui kebijakan fiskal yang tidak perlu, apalagi kerusakan distribusi sumber daya yang optimal. Terlepas dari teori ini, model pertumbuhan endogen mengungkapkan bahwa alat kebijakan fiskal, seperti belanja publik, perpajakan dan subsidi dll memiliki dampak yang kuat pada persentase pertumbuhan jangka panjang. Banyak model telah dibentuk untuk membuktikan kasus ini.

Karena besarnya pengaruh penerimaan pajak daerah dan penerimaan bukan pajak dalam struktur APBN maupun APBD dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka jika taraf hidup masyarakat meningkat menjadi lebih baik akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara ataupun daerah menjadi lebih baik juga. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara atau suatu daerah dalam periode waktu tertentu sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah

berupa penerimaan pajak daerah dan bukan pajak dari masyarakat dan untuk masyarakat daerah maka akan terwujudnya kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah itu sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan meneliti tentang *Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat*.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat mengalami fluktuasi dari tahun 2000-2014. Fluktuasi terjadi tidak hanya di kabupaten dan kota tetapi juga secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat. Fluktuasi terjadi akibat berbagai macam faktor seperti bencana alam, kebijakan pemerintah dan krisis ekonomi. Pemerintah Sumatera Barat dengan gencar kembali melakukan pembangunan dalam bidang ekonomi, infrastruktur dan sosial guna meningkatkan kembali laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat secara keseluruhan.

Dalam penelitian Helhel Y dan Demir 2012 menjelaskan bahwa hubungan antara penerimaan daerah dan pertumbuhan ekonomi sangat erat dan mempunyai

hubungan jangka panjang, ini membuktikan bahwa besarnya peranan PAD dalam pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pajak dan bukan pajak dalam penerimaan PAD merupakan suatu pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah untuk berbagai tujuan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka dalam penelitian ini perumusan masalah yang diajukan adalah:

- a. Bagaimana hubungan penerimaan pajak daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan PDRB di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Bagaimana hubungan penerimaan bukan pajak dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan PDRB di Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk melihat dan mengetahui hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah dengan PDRB di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2000.1-2014.4.
- b. Untuk melihat dan mengetahui hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan pajak dengan PDRB di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2000.1-2014.4.
- c. Untuk melihat bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan selama periode tahun penelitian.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, yaitu antara lain:

a) Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta apa hubungan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sehingga pemerintah tidak salah langkah dalam mengambil strategi atau kebijakan untuk daerah kedepannya.

b) Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan pengembangan pengetahuan lebih lanjut dan dapat digunakan sebagai perbandingan untuk kasus-kasus serupa yaitu mengenai hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan PDRB suatu daerah khususnya di Sumatera Barat pada tahun 2000-2014. Sehingga masyarakat dapat paham bagaimana kondisi perekonomian di Sumatera Barat selama periode tersebut.

1.5 Hipotesa

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka dirumuskan hipotesa sebagai berikut:

- a. Diduga penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan PDRB di Provinsi Sumatera Barat sangat erat dan mempunyai hubungan yang signifikan.
- b. Diduga penerimaan Pendapatan Asli Daerah baik pajak maupun bukan pajak keduanya memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah termasuk di Provinsi Sumatera Barat.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sisi penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sumatera Barat selama periode Tahun 2000 kuartal pertama – 2014 kuartal keempat. Penelitian ini menggunakan data time series.

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat dan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah :

1. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga Konstan 2000 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000.1-2014.4.
2. Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000.1-2014.4.

Bahan-bahan dan informasi berasal dari data sekunder yang didapat dari penggalian informasi dari berbagai sumber, bahan seminar, media masa, media elektronik, dan lain-lain serta didukung pula dengan kajian pustaka.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan hipotesa, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori yang menjabarkan teori terkait dengan judul penelitian dan menyajikan penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

- BAB III Metode Penelitian yang menjelaskan tentang metode terkait penelitian tentang Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.
- BAB IV Gambaran Umum yang menjelaskan tentang perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.
- BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan tentang hasil analisa dari proses data. Hasil penelitian dengan menggunakan *unit root test*, uji kointegrasi, uji lag optimal, uji kausalitas granger, *Vector Error Correction Model* (VECM), uji *Impulse Response Function* (IRF) dan *Variance Decomposition* (VD).
- BAB VI Kesimpulan dan Saran merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

